

## **BAB IV**

# **FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MOON JAE IN YANG LEBIH TERBUKA TERHADAP KOREA UTARA**

Bab IV ini akan membahas tentang faktor yang melatar belakangi Moon Jae In lebih terbuka terhadap Korea Utara. Penulis akan mengacu pada teori pengambilan keputusan luar negeri oleh Richard Snyder. Dimana Snyder mengatakan bahwa seseorang dalam mengambil keputusan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Bab ini akan menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi Moon dalam membuat kebijakan yaitu faktor ideologi. Serta faktor eksternal yaitu yang berasal dari aksi Korea Utara.

### **A. Faktor Internal**

Faktor internal meliputi seluruh struktur sistem politik, ideologi yang dianut dan juga mengenai tuntutan dari sebagian besar masyarakat dalam suatu negara. Jika jumlah masyarakat di dalam suatu negara berada dalam jumlah yang banyak maka tentunya akan berpengaruh terhadap masalah-masalah yang sedang menjadi perhatian publik ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara tersebut. Pada permasalahan ini, penulis akan menekankan faktor internal pada ideologi. Dalam hal ini ideologi Moon Jae In yang merupakan aktor dalam membuat kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam hubungannya dengan Korea Utara.

Ideologi adalah seperangkat ide, keyakinan, atau sikap yang menentukan perspektif seseorang yang kemudian dapat digunakan untuk menafsirkan realitas sosial dan politik. Ideologi juga merupakan sistem ide yang bercita-cita untuk menjelaskan dunia dan mengubahnya. Terdapat berbagai macam jenis ideologi, antara lain sosialisme, komunisme,

anarkisme, fasisme, nasionalisme, liberalisme, dan konservatisme (Cranston, 2018).

Ideologi adalah konsepsi dan pemikiran eksplisit atau implisit mengenai keberadaan. Ideologi juga mendefinisikan bagaimana individu atau kelompok menganggap sistem kepercayaan, gagasan, pandangan dunia, norma, atau kecenderungan yang diinginkan. Dengan demikian, ideologi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang mengembangkan ideologi mereka melalui kehidupannya. Tempat kelahiran, bahasa, lingkungan tumbuh dewasa, acara khusus, orang tua, pendidikan, dan banyak orang atau hal lain memengaruhi pembentukan ideologi individu atau kelompok tersebut. Akibatnya, orang membawa set ideologi mereka yang berbeda ke lingkungan hidup dan masyarakat mereka. Ideologi ini mempengaruhi tidak hanya gaya pengambilan keputusan individu dan kelompok tetapi juga proses pengambilan keputusan mereka (Chen, 2005).

Ideologi yang dianut oleh Moon Jae In adalah ideologi liberal. Ideologi liberal merupakan ideologi yang mempunyai fokus utama pada masalah kebebasan individu. Kaum liberal biasanya percaya bahwa, pemerintah diperlukan untuk melindungi individu agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pemerintah itu sendiri dapat menimbulkan ancaman terhadap kebebasan.

Salah satu dasar ideologi liberal adalah kebebasan dan integritas individu. Dari sudut pandang liberal, individu bukan hanya seorang warga negara yang berinteraksi dengan teman-temannya tetapi juga seseorang yang mempunyai hak di atas segalanya yang tidak boleh diganggu gugat. Individu tidak hanya memiliki hak untuk berbicara dan menulis dengan bebas, kebebasan untuk berserikat dan mengatur, kebebasan dari rasa takut akan pembalasan. Tetapi individu juga memiliki hak terlepas dari perannya sebagai warga negara. Hak-hak ini akan mengamankan keselamatan pribadinya karenanya

melindunginya dari penangkapan dan hukuman yang sewenang-wenang. Dalam demokrasi liberal ada urusan yang tidak menyangkut negara. Urusan seperti itu contohnya seperti praktik agama hingga penciptaan seni dan cara orang tua dalam membesarkan anak-anak (Richard Dagger, 2018).

Saat ini, pemerintahan Korea Selatan didominasi oleh partai demokrasi liberal yang bernama Partai Demokratik Korea yang mana pada tahun 2017 berhasil membawa Moon Jae In dalam memenangkan pemilihan Presiden. Partai Demokratik Korea adalah partai yang mendukung nilai-nilai hak asasi manusia, kebijakan ekonomi yang berbasis pada pasar, mendukung untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara. Partai Demokratik Korea biasanya menggunakan cara-cara yang lunak seperti menggunakan pendekatan maupun dialog. Partai ini menginginkan adanya kerjasama serta pertukaran dengan Korea Utara. Karena denuklirisasi dan perdamaian di kawasan Semenanjung Korea menjadi agenda utama partai ini (McCurry, South Korea set to change policy on North as liberal wins election, 2017).

Partai Demokratik Korea didirikan oleh Kim Dae Jung pada tahun 1995. Seperti yang kita ketahui bahwa Kim Dae Jung merupakan Presiden Korea Selatan yang membuat *Sunshine Policy* dan kemudian kebijakan tersebut juga diimplementasikan oleh Roh Moon-hyun. Roh mempunyai kedekatan dengan Moon, yang pada saat itu Roh meminta Moon Jae In untuk menjadi Kepala Sekretaris Kepresidenan. Bagi Moon, *Sunshine Policy* merupakan kebijakan yang sudah tidak asing lagi baginya. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang membuat Moon mengambil kebijakan yang sama (McCurry, Who is Moon Jae-in, South Korea's new president?, 2017).

Keinginan Moon yang akan lebih menggunakan cara-cara dialog untuk mengatasi masalah dengan Korea Utara disampaikannya pada pidatonya saat menjelang KTT G20 di gelar. Moon mengatakan "*Situasi pada saat ini di mana tidak*

*adanya kontak antara otoritas yang relevan di Selatan dan Utara sangat berbahaya*". Moon juga menambahkan jika dirinya siap untuk mengadakan pertemuan dengan Kim Jong Un, "*Saya siap bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kapan pun dan di mana pun, jika kondisinya sesuai dan jika mereka memberi kesempatan untuk mengubah ketegangan dan konfrontasi di Semenanjung Korea*" (Widiyanto, 2017).

Moon Jae In adalah seorang pengacara yang menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat mahasiswa, Moon adalah seorang aktivis yang bergabung dengan demonstrasi massa untuk melakukan aksi protes terhadap sikap kediktatoran Park Chung Hee. Park Chung Hee merupakan ayah dari Presiden Korea Selatan sebelum Moon yaitu Park Geun Hye (Minegishi, 2017).

Ideologi yang Moon Jae In anut tentu sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Dimana dengan ideologi liberal, Moon lebih memilih menggunakan cara-cara yang lebih terbuka. Yaitu cara-cara dengan menggunakan perundingan terhadap Korea Utara dibandingkan dengan menggunakan cara-cara agresi. Dan hal ini tentu merupakan salah satu prinsip Partai Demokratik Korea yang mana partai tersebut yang mengantarkan Moon hingga terpilih menjadi Presiden. Prinsip dari Partai Demokratik Korea dalam menyelesaikan masalahnya dengan Korea Utara yaitu lebih menggunakan cara-cara yang lebih lunak. Seperti yang kita ketahui, Presiden para pendahulunya yaitu Lee Myung Bak dan Park Geun Hye merupakan seorang yang berasal dari partai yang beraliran konservatif. Dimana mereka cenderung menggunakan cara-cara yang lebih keras seperti contoh memutuskan kontak dan memberikan sanksi terhadap Korea Utara.

## **B. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal pada umumnya mencakupi faktor-faktor dan kondisi-kondisi atas wilayah territorial suatu negara baik aksi dan reaksi dari negara lain dan masyarakat dengan mana mereka bertindak dalam lingkungan internasional. Faktor eksternal sendiri biasanya berasal dari luar negaranya seperti dari negara lain ataupun dari dunia internasional. Contohnya seperti aliansi internasional, situasi politik internasional, konflik internasional. Dari sudut ini yang harus dipertimbangkan adalah posisi geopolitik negara dalam sistem global serta hubungannya dengan negara lain yang memiliki relevansi.

Dalam hal ini, Korea Utara merupakan negara yang mempunyai relevansi dengan Korea Selatan. Aksi maupun reaksi Korea Utara akan berpengaruh terhadap Korea Selatan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa Korea Utara adalah negara yang masif dalam melakukan uji coba nuklir. Hal ini tentu mendapat tentangan dari dunia internasional, tak terkecuali Korea Selatan yang merupakan tetangga terdekat dari Korea Utara. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tentu dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Korea.

Korea Utara memulai uji coba nuklirnya pada tahun 2006 yang dilakukan di sebuah terowongan yang berada di daerah timur laut Punggye-ri. Uji coba pertama tersebut menghasilkan sebuah ledakan dengan kekuatan 1000 ton. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat bahwa ledakan tersebut menimbulkan adanya getaran yang dapat dirasakan di kawasan Semenanjung Korea dengan kekuatan 4,2 Skala Richter (SR). Pada tahun 2009, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir dengan kekuatan yang lebih besar. Uji coba kedua dilakukan di daerah timur tepatnya di daerah Kilju. USGS kembali mencatat ledakan tersebut berkekuatan 4,7 SR. Ledakan kedua ini getarannya terasa hingga di daerah perbatasan China Yanji (Muhaimin, 2017).

Hingga selang 5 tahun, Korea Utara kembali melakukan uji coba yang ketiga pada tahun 2013. Ini merupakan uji coba nuklir pertama yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Uji coba nuklir ini kembali dilakukan di daerah Punggye-ri. Para ahli mencatat bahwa ledakan ini merupakan ledakan terbesar dibanding dengan ledakan sebelumnya. Ledakan tersebut diperkirakan mempunyai kekuatan sebesar 4,7 SR hingga 5,2 SR.

Pada awal tahun 2016, Korea Utara mengaku kembali melakukan uji coba nuklir yang keempat dengan menggunakan miniatur bom hidrogen. Uji coba tersebut kembali dilakukan di situs nuklir Punggye-ri dengan kekuatan 5,1 SR. Pada bulan September 2016, Korea Utara kembali meluncurkan nuklirnya di daerah Punggye-ri. Kali ini ledakan tersebut mempunyai kekuatan 5,3 SR atau 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan ledakan sebelum-sebelumnya. Setahun setelahnya, Korea Utara melakukan uji coba nuklir kembali tepatnya pada bulan September 2017. Ini merupakan ledakan dengan kekuatan terbesar yaitu 6,3 SR yang kembali dilakukan di Punggye-ri (Muhaimin, 2017).

Terhitung dari tahun 2006 hingga tahun 2016, Korea Utara masif dalam melakukan uji coba nuklir hingga menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Pada tahun 2017, Korea Utara masih melakukan uji coba nuklir namun terhitung hanya satu kali saja. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Korea Utara telah meredam uji coba nuklirnya. Tentu apa yang dilakukan oleh Korea Utara memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan. Ditambah juga pada saat itu pemimpin Korea Selatan telah mengalami pergantian pemimpin dari Park Geun Hye menjadi Moon Jae In. Aksi yang dilakukan oleh Korea Utara dengan meredam uji coba nuklirnya tentu membuat Korea Selatan mau untuk memulai pendekatan kembali dengan Korea Utara. Sehingga hal ini dapat membuka kesempatan bagi kedua negara untuk memperbaiki hubungan kembali.

Hal ini ditunjukkan oleh Moon Jae In dalam membuat kebijakannya dengan lebih terbuka terhadap Korea Utara. Dimana untuk pertama kalinya pada bulan Maret 2018 perwakilan kedua negara bertemu kembali untuk membicarakan tentang rencana denuklirisasi dan perdamaian permanen di kawasan Semenanjung Korea (VOA, Kim Jong-un Bertemu dengan Para Pejabat Korea Selatan, 2018).

Setelah adanya pertemuan tersebut, kedua negara semakin sering dalam melakukan pertemuan bilateral. Pada April 2018, Moon Jae In dan Kim Jong Un untuk pertama kalinya bertemu di garis demarkasi militer tepatnya berada di Desa Panmunjom yang memisahkan kedua negara tersebut. Keduanya berjabat tangan di garis demarkasi sebagai simbol bahwa kedua negara telah melakukan perdamaian (Muhamad, 2018).

Pada bulan September 2018, Moon dan Kim kembali beretemu di Pyeongyang Korea Utara untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya. Pertemuan tersebut membahas tentang denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea. pada pertemuan tersebut, Moon menyatakan bahwa Kim Jong Un telah menyetujui untuk menutup secara permanen Tongchang-ri yaitu fasilitas uji mesin dan peluncuran misil (News, 2018).

Bahkan Korea Utara pada awal tahun 2018 bersedia untuk mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat. Dimana yang kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang sangat mengecam tindakan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Amerika Serikat juga menekan Korea Utara dengan cara memberikan sanksi-sanksi. Pertemuan tersebut diadakan di Singapura pada bulan Juni yang mempertemukan Donald Trump dan Kim Jong Un. Pada KTT tersebut, kedua negara membahas tentang upaya denuklirisasi dan perdamaian serta hubungan baru antara AS dan Korea Utara. Pertemuan ini dapat berlangsung juga karena terdapat campur tangan dari Moon Jae In (Synder, 2018).

Diawali dengan meredamnya sikap Korea Utara dengan tidak lagi melakukan uji coba nuklir secara masif, pada Mei 2018 Korea Utara menyatakan akan menutup situs uji coba nuklirnya di Punggye-ri. Sikap Korea Utara ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan oleh sekelompok ahli geologi menemukan bahwa gunung yang digunakan oleh Korea Utara untuk pengujian bom nuklirnya telah runtuh sebagai akibat dari ledakan. Gunung yang runtuh itu meningkatkan kekhawatiran tentang adanya ancaman radioaktif. Tim ahli geologi Tiongkok percaya bahwa keruntuhan itu adalah hasil dari ledakan nuklir Korea Utara yang paling kuat pada musim gugur yang lalu. Bom nuklir diledakkan sekitar 2.300 kaki di bawah puncak gunung yang menyebabkan adanya gempa susulan dan runtuhnya gunung (Nace, 2018).

Selain alasan diatas, terdapat alasan yang lain yang melatarbelakangi Korea Utara menutup situs uji coba nuklirnya. Yang pertama, adanya ancaman yang dilakukan oleh Donald Trump. Ancaman tersebut mengenai serangan terhadap fasilitas nuklir dan misilnya. Yang kedua, adanya sanksi-sanksi yang diberikan oleh Donald Trump terhadap Korea Utara. Trump percaya bahwa tanpa adanya uang tunai, Korea Utara tidak akan bisa melakukan uji coba nuklir. Sejauh ini, sanksi-sanksi ketat yang diberikan Amerika Serikat dirancang hanya untuk membawa Kim ke meja perundingan. Dan jika hal tersebut tidak berhasil, Trump akan lebih menekan Korea Utara dengan meningkatkan tekanan pada sponsor-sponsor kekuatan besarnya seperti Rusia dan China. Trump telah mengisyaratkan bahwa ia akan menargetkan bank-bank Cina yang mana merupakan titik lemah bagi Beijing. Menurut Bloomberg, Trump awal tahun 2018 memutuskan untuk tidak menegakkan undang-undang pencucian uang terhadap institusi perbankan Tiongkok terbesar kedua dan ketiga yaitu China Construction Bank dan Agricultural Bank of China. Kedua bank tersebut diduga menangani transaksi kotor untuk Korea Utara. Hal tersebut

tentu rentan terhadap denda dengan dakwaan "masalah pencucian uang primer" sesuai dengan Bagian 311 UU Patriot.

Sedangkan China juga terbukti telah melanggar tindakan Dewan Keamanan PBB dimana mengimpor paduan besi dari Korea Utara dan banyaknya buruh Korea Utara yang sekarang ini kembali ke China. Dan kemudian ada masalah saat Xi Jinping memberikan hadiah kepada Kim Jong-un dan istrinya pada bulan Maret lalu di Beijing. Pemberian barang-barang itu seperti perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya yang diperkirakan bernilai \$ 394.000 merupakan bentuk pelanggaran yang mencolok terhadap peraturan PBB. Dengan mengancam China, Trump mungkin dapat memaksa China untuk memotong sponsor yang diberikan untuk Kim sepenuhnya.

Jika China benar-benar memutuskan untuk memotong sponsor, maka Korea Utara tidak akan memiliki pilihan lagi selain mendapatkan bantuan dari Trump (Chang, 2018).